

PEREMPUAN DAN PERDAMAIAN

Catatan tentang *Peacebuilding*



Ala'i Nadjib

Wakil Ketua PP Lakpesdam NU
dan Redaktur Jurnal Tashwirul Afkar

Mungkinkah tingkat kekerasan di dunia ini belum menyamai tingkat usaha perdamaian yang diupayakan oleh manusia? Jangan-jangan membuat konflik dan memutuskan perang lebih mudah dibanding mencip-

takan perdamaian dan semangat memaafkan.

Cerita tentang kekerasan manusia sudah berlangsung lama. Perseteruan anak-anak Adam dan Hawa, yaitu Qobil dan Habil, yang memperebutkan seorang perempuan jelita, Iqlima, yang juga masih saudara kandung keduanya, barangkali dapat menjadi awal kekerasan sekaligus mengilhami manusia bagaimana mencari damai sesama manusia.

Dewasa ini, upaya untuk melakukan perdamaian terus-menerus dilaksanakan, salah satunya dengan *peacekeeping* (penjagaan perdamaian). Indonesia telah lama berpartisipasi aktif dalam penjagaan perdamaian di tingkat internasional,¹ terutama melalui pengiriman pasukan perdamaian ke negara-negara yang sedang dilanda konflik.² Upaya-upaya *peacekeeping* itu misalnya diwujudkan dalam bentuk

¹ Ironisnya, penjagaan perdamaian dengan pengiriman pasukan yang sering dicatat sukses menjalankan misinya dan netral dari pihak-pihak yang bertikai. Padahal di Indonesia, justru kekuatan bersenjata yang sering ditengarai banyak terlibat dan menjadi "aktor" dalam konflik. Lihat misalnya kerusuhan Ambon, Sampit, dll. Keterlibatan mereka yang menimbulkan kekerasan maha hebat misalnya dapat dilihat dari konflik Aceh yang berkepanjangan.

² Tahun 2006 saja Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dari unsur TNI ke Libanon. Pengiriman pasukan ini menimbulkan kontroversi dari aspek pembiayaan, tapi tidak pada misi perdamaian yang diembannya. Dalam banyak misi pengiriman pasukan perdamaian, hanya sekali perempuan dicatat terlibat dalam kontingen Garuda XIV-13 (1999–2000) ke Bosnia Herzegovina. Dia adalah Letkol Pengasih Gaut. Untuk itu, ia harus diuji oleh seorang staf PBB (Irlandia) mengenai kemampuan Bahasa Inggrisnya dan minta jaminan untuk diberangkatkan ke Bosnia. Sang staf ini kemudian berjanji menulis surat khusus kepada Kapolri jika ia lulus. Ketika ujian, ia harus bersaing dengan lima Letkol laki-laki, dan nyatanya ia lulus ujian untuk ke Bosnia dan akhirnya terpilih memimpin kontingen Garuda itu di tahun 1999.

keterlibatan masyarakat dalam menjaga perdamaian, menegakkan HAM, menghormati hak-hak sipil, melindungi anak, serta menegakkan keadilan gender.³ Selain itu ada juga upaya *peacebuilding* ('pemberdayaan perdamaian') yang dilakukan.

Peacebuilding sebenarnya lebih diarahkan sebagai usaha aktif untuk membangun kembali masyarakat agar perdamaian yang sudah ada dapat terus berlangsung dan mengupayakan perukunan kembali (*reconciliation*) daerah-daerah yang berkonflik. Di samping itu, *peacebuilding* juga dapat berfungsi sebagai penyatuan kembali ke situasi yang lebih damai, mendorong proses pengadilan yang efektif dan adil, berpartisipasi politik secara proporsional, dan menghormati budaya, adat, serta agama. Dalam konteks perdamaian dan perempuan, semuanya itu harus dilakukan dalam bingkai kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan peran dan fungsi tersebut, *peace building* menjadi agenda bersama. Rencana, harapan, dan pelaksanaannya

diupayakan terus-menerus. Tentu saja hal itu tidak mengherankan karena dunia saat ini dipenuhi angkara murka. Ini ditunjukkan dengan meningkatnya grafik kekerasan, baik secara individual maupun kolektif. Kalau 2001 dilaporkan sebagai tahun *Anno Horrobilis*⁴ yaitu tahun yang mengerikan dengan kekerasan, bisa jadi tahun ini lebih parah lagi.

Lantas dari mana kekerasan itu berasal? Acapkali, konflik sering dialamatkan kepada agama sebagai pemicu, selain motif ekonomi dan adat. Terlepas dari motif semacam itu, tetapi manusia sendiri sebenarnya sumber konflik yang sebenarnya. Johan Galtung,⁵ Ketua Institut Perdamaian Internasional di Oslo Norwegia, merujuk pendapat Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa kekerasan adalah suatu yang 'alamiah' karena manusia adalah *homo homini lupus* dan menjadikan manusia berwatak srigala. J.J. Rousseau melihat bahwa kekerasan merupakan mata rantai peradaban manusia yang tersembunyi. Peradaban seperti

³ Alih-alih menjaga perdamaian, dalam sejarah kekerasan di Aceh, salah satunya ditandai dengan Operasi Jaring Merah (kita mengenalnya DOM, Daerah Operasi Militer) yang berlangsung Mei 1989–7 Agustus 1998, perempuan telah menjadi korban kekerasan dari TNI juga tentara GAM yang luar biasa. Perempuan diperkosa dan digunakan sebagai alat teror untuk melemahkan musuh dan menghancurkan perlawanan. Mereka dijadikan sasaran perantara, misalnya kasus istri Panglima Sago GAM dan bayinya disandera oleh TNI (Serambi Indonesia); istri TNI dan adik perempuannya berbulan-bulan disandera GAM di hutan (kisah nyata Safrida dan Soraya). Bukan itu saja, sejak pendudukan para tentara itu, perempuan dilabelkan kepada pihak yang bertikai, misalnya Inong Bale, jandanya GAM, Inong si Pa'i jandanya TNI, dll, serta terjadi pengucilan bagi mereka. Lihat data-data yang dipresentasikan oleh Suraiya Kamaruzaman dalam *Konfrensi Women for Peace* oleh Departemen Filsafat UI, Jakarta 30 April–1 Mei 2007.

⁴ *Kompas*, 5 Des 2001.

⁵ Pikiran-pikiran Galtung tentang perdamaian dan kekerasan tersebar dalam berbagai tulisannya. Lihat misalnya dalam artikelnya, "Religions, Hard and Soft"

inilah yang membentuknya menjadi berwatak binatang dan bisa saling menyerang.

Menurut tipe kekerasan struktural, ada dua macam bentuk kekerasan: vertikal dan horizontal. Secara vertikal, bentuk kekerasan bisa muncul dalam bentuk eksploitasi ekonomi dan penindasan politik. Sedangkan kekerasan horizontal bisa muncul dalam bentuk pengasingan suatu kelompok atau masyarakat.

Lepas dari asal dan bentuk kekerasan itu sendiri, meraih perdamaian acapkali harus dengan ongkos sosial yang mahal. Misalnya dengan melangsungkan peperangan untuk perdamaian. Persoalannya, wajarkah kita memerankan peperangan demi menciptakan perdamaian? Mungkin situasi dan kondisi itu tidak bisa dinafikan, tapi tidakkah hal itu bisa dihindari? Karena itu, yang wajib dilakukan adalah bagaimana manusia menciptakan perdamaian, tanpa peperangan fisik.

Pertanyaannya kemudian, apakah upaya serius dalam menciptakan perdamaian telah melibatkan perempuan terutama untuk keputusan-keputusan penting yang menyangkut hidup dan masa depan mereka? Bagaimana perdamaian juga menimbang perlindungan dan keadilan reproduksi yang diyakini sebagai salah satu jalan keberlangsungan hidup?

Tulisan ini hendak melihat konstruk perdamaian dalam berbagai prespektif,

keterlibatan perempuan dan perdamaian, melihat catatan korban perempuan dalam konflik, dan peran perempuan dalam *peace building*.

Ketika Perdamaian Diformalkan

Ketika kita dapat menjalankan ritme kehidupan sehari-hari dengan tenang, nyaman, aman, dan terbebas dari rasa takut, maka itulah yang kita definisikan tentang damai. Pada dasarnya semua orang menghendaki perdamaian, tapi melihat kehidupan yang semakin kompleks seperti sekarang ini, kita seringkali dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang kontradiktif. Kita ingat sebuah lagu yang sangat populer pada 1980-an yang berjudul *Perdamaian*:⁶

*"Perdamaian-perdamaian,
banyak yang cinta damai,
tapi perang makin ramai,
bingung-bingung ku memikinya,*

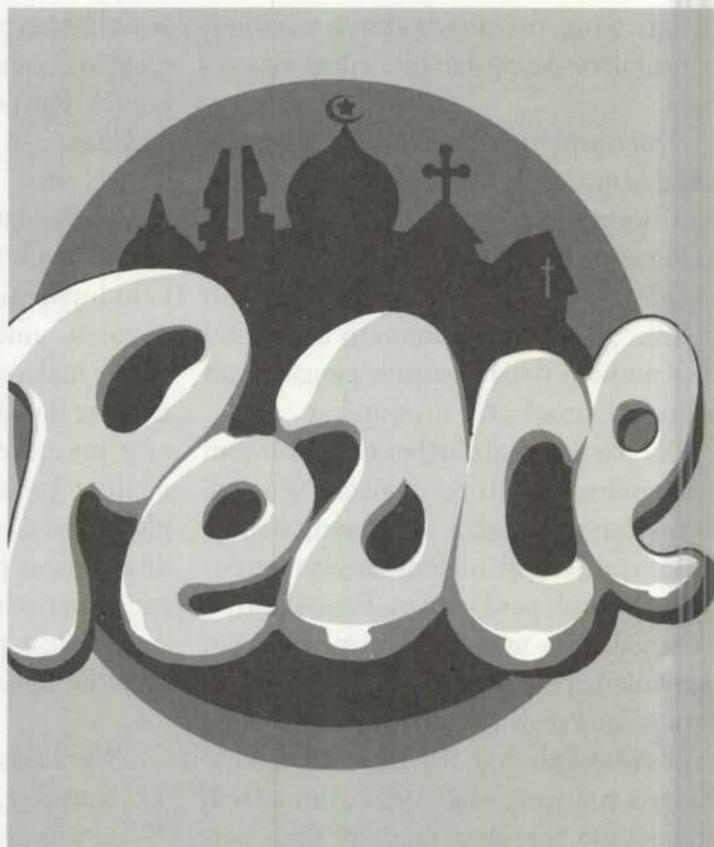
*Wahai kau anak manusia ingin damai
dan sentosa,
tapi kau buat senjata,
biaya berjuta-juta,
banyak gedung kau dirikan kemudian
kau hancurkan,
rumah sakit kau dirikan,
orang sakit kau obatkan,
orang miskin kau kasihi*

⁶ Lagu ini ditulis Ketua PWNU Jawa Tengah, Bukhori Masruri atau lebih dikenal dengan nama pena Abu Haidar. Lagu tersebut dipopulerkan oleh Orkesw Gambus Nasyida Ria Semarang dalam irama Qosidah. Sekarang diaransemen ulang dalam irama pop rock. Bukan irama itu yang ingin kita lihat kembali, tapi lirik dalam lagu itu.

anak yatim kau
santuni,
bom atom kau ledakkan
semua jadi berantakan,
bingung-bingung ku
memikinya”

Fenomena yang direnungkan sang penulis lagu itu seperti sebuah siklus yang berulang-ulang dalam kehidupan manusia saat ini. Semisal, resolusi konflik dipelajari, digagas, diimplementasikan. Demikian juga perdamaian diproklamirkan. Tapi manusia seperti mengejek dirinya sendiri dengan perbuatannya. Kita tidak akan melupakan drama kemanusiaan ketika Amerika Serikat membombardir Afghanistan dari udara. Tragisnya, tak ada senjata seanggih apapun yang bisa membedakan sasarannya, apakah itu target sasarannya, atau mereka yang tak tahu apa-apa, perempuan, anak-anak, dll?

Serangan dengan dalih perang melawan terorisme itu dilanjutkan dengan pengiriman makanan dan obat-obatan dalam jumlah yang besar kepada rakyat Afghanistan di hari berikutnya. Tindakan kemanusiaan dan sandiwara macam apa yang hendak dipertontonkan kepada dunia? Pada saat yang sama, hampir semua orang di dunia ini tidak punya hambatan untuk melihat setiap detik kejadian di dunia. Bukankah peristiwa itu sama persis



Istimewa

dengan keresahan penulis lagu di atas. Sebuah penyerangan dilakukan, pertolongan diteruskan, inikah cara meminta maaf? Namun besok serangan kepada bangsa lain dilakukan. Dunia mengutuknya, tapi AS tak berhenti dengan keputusannya, bahkan semakin semena-mena dengan melebarkan wilayahnya ke Iraq sampai hari ini. Tindakan itu mungkin paralel dengan apa yang dilukiskan Thomas Hobbes, bahwa kekerasan itu merupakan suatu yang 'alamiah' karena manusia adalah *homo homini lupus*, manusia memang berwatak srigala, bisa saling menyerang.

Dalam konteks itu, konsepsi Islam

mengingat manusia yang sebenarnya mampu menciptakan dirinya dalam bentuk yang sempurna (*fi ahsani taqvim*), tapi ia juga dapat menciptakan dirinya sampai ke derajat yang sangat rendah sekali (*asfala safilin*). Dengan potensi buruk yang tak terkendalikan itu, manusia—seperti kata Hobbes—sama buasnya dengan hewan.

Di tanah air, kekerasan dengan beragam bentuknya juga kerap terjadi. Misalnya di Sampit, Poso, Maluku, Aceh dll. Jika kekerasan dan konfliknya sudah semakin melebar dan penyebabnya pun sangat kompleks, perdamaian tidak cuma dilakukan orang per orang, tetapi melalui pelembagaan yang formal. Sayangnya, perdamaian disepakati dan dianggap sebagai jalan penyelesaian yang justru tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya. Di sinilah di antara problem perdamaian yang diformalkan dan diresmikan. Kasus Aceh adalah sebuah contoh bagaimana bibit perdamaian diformulasikan. Masa *cooling down* diterapkan lewat berbagai operasi (Operasi Sadar Rencong, Operasi Cinta Meunasah, Operasi Pemulihan, Operasi Darurat Militer dll). Tetapi semua usaha itu mungkin dicatat oleh masyarakat sebagai kekerasan dalam bentuk lain, bukan upaya perdamaian yang direncanakan oleh negara.

Dari fenomena seperti itu, ancaman sudah meluas dan perdamaian yang ingin diwujudkan pun harus melembaga. Tetapi tanpa melibatkan atau memberdayakan perdamaian bersama masyarakat, mustahil itu semua bisa diwujudkan. Seperti

ditegaskan Galtung bahwa mewujudkan perdamaian hanya bisa dilakukan dengan saran-sarana yang damai. Perdamaian adalah apa yang kita miliki ketika transformasi konflik yang kreatif berlangsung tanpa kekerasan. Dengan cara itu, kita melihat perdamaian sebagai sebuah karakteristik sistem. Karena itu, untuk menciptakannya, perlu usaha untuk mengurangi kekerasan dan menghindari kekerasan. Salah satu caranya dengan membangun perdamaian kultural maupun struktural serta menumbuhkan semangat memaafkan.

Perempuan Korban Konflik, Perempuan Pencipta Damai

Perempuan dan anak-anak diyakini selalu menjadi korban terbesar dalam konflik. Karena konflik, mereka mendadak menjadi janda, yatim, kehilangan tempat tinggal, menjadi pengungsi, target pertempuran, dan menjadi tawanan kelompok. Itu adalah sebab yang kasat mata, dan masih ada bahaya mengintai mereka setiap saat, seperti; perkosaan, perdagangan manusia (*trafficking*) dan marjinalisasi. Apakah mereka hanya bisa menjadi korban? Bukankah perempuan korban yang seperti itu dapat pula terlibat aktif dalam menyemai perdamaian?

Di Indonesia, kalau dirunut dari sisi korban, sejarah konfliknya ditandai dengan panjangnya daftar kekerasan terhadap perempuan. Aceh bisa dijadikan sebagai contoh dengan kasus sebagai berikut:

- Kasus masa DOM, 102 perkosaan dan 91 pelecehan seksual

- Pasca Dom (1998 – 2000) 56 penembakan; 8 penculikan dan penghilangan; 7 pembunuhan; 26 penganiayaan; 19 pembakaran, perajahan, dan perampokan; 20 kekerasan seksual (perkosaan dan pelecehan); 40 intimidasi berbasis gender (razia jilbab)

- Akibat konflik itu, 14.000 perempuan menjadi janda selama 1989-2004. Setiap tahun sedikitnya ada 875 orang yang menjanda (Data Kepala Biro Pemberdayaan perempuan Aceh, 1 Oktober 2004)

- Ribuan perempuan trauma. Di Kabupaten Aceh Utara terdapat 4.300 janda trauma (Kep. Biro PP Aceh, 22 Juli 2004)⁷

Dengan adanya konflik, mayoritas perempuan⁸ dan anak-anaklah yang menjadi korban. Padahal mereka bukan penyebab dan pelaku konflik. Namun mereka yang harus menanggung langsung akibat konflik itu dengan status baru sebagaimana di atas, pengungsi, janda, kehilangan pencari nafkah dll. Kenyataan

itulah yang kita saksikan dari deretan panjang konflik bersenjata yang terjadi di Maluku, Sampit, Poso, Papua sampai Aceh.

Contoh-contoh di atas adalah konflik dengan skala nasional di Indonesia. Namun konflik dapat pula terjadi dalam tingkat lokal, domestik, dan kelompok yang lebih kecil. Keluarga misalnya di mana perempuan dan anak-anak rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti penyalahgunaan tindakan pada anak (*child abuse*) dan penyalahgunaan tindakan pada perempuan (*woman abuse*) yang dilakukan melalui pengungkapan fisik maupun verbal. Penyalahgunaan tindakan kepada anak-anak dan perempuan merupakan tingkat keempat dari delapan bentuk kekerasan yang dipetakan Galtung⁹.

Peace Building dan Keadilan Gender

Melihat eskalasi konflik, korbannya dan perundingan-perundingan yang sudah berjalan, *peace building* untuk

⁷ Lihat paper Suraiya Kamaruzaman dalam konferensi *Women for Peace*, oleh Dept. Filsafat UI, Jakarta 30 April -1 Mei 2007.

⁸ Media pernah mencatat bahwa Raisa, istri Slobodon Milosovic (mantan Presiden Serbia, meninggal di penjara tahun lalu) adalah arsitek dibalik pembantaian etnis/genocida di Bosnia. Meski dunia mengakui kekejaman Slobodon, tak urung terkuaknya peran Raisa menghebohkan dunia, suatu kasus yang amat sangat jarang terjadi.

⁹ Delapan bentuk kekerasan itu adalah 1) kekerasan terhadap alam yang ia sebut sebagai *ecological crimes*. 2) kekerasan terhadap diri sendiri, seperti stres, bunuh diri, alkoholisme dan sejenisnya. 3) kekerasan terhadap keluarga, seperti *child abuse* dan *woman abuse* yang dilakukan melalui pengungkapan fisik maupun verbal. 4) kekerasan terhadap individu, seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan. 5) kekerasan terhadap organisasi yang dalam pengungkapannya dapat berupa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 6) kekerasan terhadap kelompok, meliputi berbagai bentuk kekerasan antar

perempuan ternyata belum mendapat ruang yang penuh, utamanya keterlibatan mereka dalam menentukan dan mengambil kebijakan. Padahal konflik-konflik itu tentu menimbulkan konsekuensi sendiri bagi perempuan. Sebagaimana di Aceh, bagi para penduduknya, terutama mereka yang menjadi korban, konflik sebagai suatu peristiwa sosial telah menciptakan pengalaman, pengetahuan, dan sikap tersendiri. Dalam disiplin ilmu sosial hal itu disebut KAP (*Knowledge, Attitude, Perception* atau *Practice*).¹⁰ KAP merupakan variable yang berperan dalam menentukan kebijakan perilaku baru yang berbeda dengan perilaku sebelumnya. Konflik yang terjadi di Aceh otomatis telah mengubah dan membawa konsekuensi sendiri. Perubahan itu niscaya, yakni perubahan yang tidak menguntungkan, karena banyak dari mereka kehilangan keluarga, harta dan kehormatannya. Yang menyakitkan lagi munculnya stigma baru sebagai korban pemerkosaan, atau janda dengan status yang tidak jelas, karena suaminya pergi dan tidak jelas juga keberadaannya. Semestinya dalam konteks KAP, perubahan itu dimaksudkan sebagai suatu kemajuan, perubahan ke arah yang lebih baik.

Dengan melihat realitas korban perempuan, sudah semestinya perempuan ikut terlibat dalam proses perdamaian. Memang banyak dari mereka sudah menjadi negosiator dalam perundingan-perundingan penting, tapi memperhatikan catatan keterlibatan mereka, perannya masih banyak di tingkat lokal dan banyak dari mereka atas inisiatif sendiri maupun kelompoknya di tempat mereka tinggal. Keputusan-keputusan penting yang membutuhkan diplomasi internasional di meja perundingan dengan lembaga-lembaganya selalu absen dari partisipasi perempuan. Perundingan di Helsinki beberapa tahun lalu merupakan contoh konkritnya. Sebenarnya apa yang dibawa oleh delegasi Indonesia di Helsinki bertujuan untuk membawa Aceh lebih baik, demi perdamaian. Perdamaian yang larut dalam publisitas dunia semacam Helsinki itu semata—mata adalah perdamaian untuk syahwat politik tanpa banyak melihat hak-hak reproduksi (*reproductive health*). Aktifis perempuan Aceh, Suraiya Kamaruzaman mencatat dan memberi kesaksian bahwa perempuan 'hilang' dalam keputusan-keputusan penting. Di antaranya dalam,

1. Proses dalam meja-meja perun-

kelompok, antar kelas, dan antar bangsa. 7) kekerasan terhadap masyarakat, berupa perang dan penindasan antar bangsa atau negara. 8) kekerasan terhadap dunia lain, berupa kekerasan antar planet. Jenis kekerasan yang ketiga sampai keenam, dalam sistem pencatatan dan pelaporan nasional, dikenal sebagai tindak kejahatan. Lihat Johan Galtung, *On the Social Cost of Modernization: Social Disintegration, Atomie/Anomie and Social Development*, *Atomie/Anomie and Social Development*, dalam *Development and Change*, Vol. 27, No. 2, 1996 dikutip oleh Mohsen Labib dalam artikel-artikel tentang Teori John Galtung.

¹⁰ Lihat *Jurnal Perempuan*, No.24 th 2002, hlm. 12

dingan, para aktor yang bertikai (para elit GAM dan elit RI) difasilitasi oleh pihak ketiga. Contohnya Henry Dunant Centre dan Crisis Management Initiative sebagai mediator resmi, tercatat dan disebarakan melalui media-media.

2. Proses-proses perdamaian dari Aceh, Jakarta, Tokyo, Stocholm, Geneva dan Helsinki, Jeda kemanusiaan, penerapan syariat Islam, kesepakatan penghentian permusuhan; *the Cessation of Hostilities Agreement*, (CoHA) sampai ditan-datanganinya Nota Kesepahaman Aceh Damai antara RI-GAM pada 15 Agustus 2005.

3. Tidak mempertimbangkan aspek gender dalam proses resolusi konflik yang dikembangkan dan sama sekali tidak memasukkan unsur resolusi dewan keamanan PBB nomor 1325 tahun 2000 yang menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian.¹¹

Tentang *peacebuilding* dan *peacekeeping* serta hubungannya dengan peranan perempuan, sebenarnya PBB telah mengeluarkan resolusi no 1325 pada Oktober tahun 2000 yang menegaskan komitmen dengan “pemberdayaan perdamaian” dan “penjagaan perdamaian” dalam hubungannya dengan perempuan.¹²

Mengapa pemberdayaan perdamaian

dan penjagaan perdamaian yang sudah dilakukan perempuan dalam hidupnya perlu dan baru pada tahun 2000 disahkan sebagai resolusi PBB? Ada latar belakang dan harapan kuat apa sehingga PBB mengeluarkan resolusi itu, seperti perlindungan perempuan dalam konflik bersenjata, perlindungan perempuan dan masyarakat sipil dalam pencegahan konflik, resolusi damai dan inisiatif-inisiatif dalam *center* perdamaian¹³. Tentu saja resolusi itu tidak serta merta, tapi melalui lobi-lobi LSM, pemerintahan dan juga inisiatif-inisiatif yang dibangun sebelumnya. Resolusi ini mempertegas akan pentingnya beberapa hal:

1. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan proses perdamaian

2. Memasukkan perspektif jender dalam *training* dan penjagaan perdamaian

3. Melindungi perempuan dan anak-anak di wilayah konflik dan kamp pengungsi.

4. Adanya pengarusutamaan jender (*gender mainstreaming*) dalam sistem PBB maupun implementasi program.

Tujuan itu tentu harus ditindaklanjuti dengan memasukkan kerja-kerja dalam proses perdamaian untuk perdamaian yang lebih berkelanjutan. Misalnya

¹¹ Poin-poin diskusi yang dipresentasikan Suraiya Kamaruzaman dalam konferensi *Women for Peace*, oleh Dept. Filsafat UI, Jakarta 30 April -1 Mei 2007.

¹² Lihat resolusi DK PBB United Nations S/RES/1325 (2000)

¹³ Lihat presentasi Heidi Ober, 'International Alert' dalam Konferensi *Women for Peace*, yang diselenggarakan oleh Dept. Filsafat UI, Jakarta 30 April -1 Mei 2007.

melalui perukunan kembali (*reconciliation*) dan penilaian akan apa yang dibutuhkan dalam perdamaian dan adanya negosiasi sehingga perdamaian bisa terjaga. Lewat resolusi itu pula, nantinya setiap bangsa yang menjadi anggota PBB menerima tanggung jawab dan memastikan bahwa tindakannya di level nasional maupun internasional telah melibatkan apa yang ada dalam resolusi.

Semestinya, resolusi PBB menjadi referensi di mana proses-proses perdamaian dijalankan. Di Indonesia, perempuan justru secara formal tidak ada dalam proses perdamaian yang paling menentukan, Aceh adalah contoh nyatanya. Dalam perjanjian damai berskala internasional di Helsinki, mereka sama sekali tidak memasukkan unsur resolusi Dewan Keamanan PBB 1325. Kaum perempuan tidak ikut menentukan dalam membuat kalimat-kalimat penting pernyataan perdamaian yang sangat menentukan nasib mereka sebelum atau setelah konflik. Bias jender amat terasa karena perjanjian itu penuh muatan politik, politik maskulinitas dan tak jauh dari budaya patriarki. Kenyataan ini mengabaikan kontribusi, pengalaman, dan pengetahuan perempuan dalam membuat kebijakan menuju perdamaian. Bukan itu saja, konflik Aceh selama 30 tahun dipersempit menjadi persoalan GAM vis-à-vis RI dan isu kemerdekaan, padahal persoalan yang muncul sepanjang konflik sangatlah kompleks.

Mungkin bukan Indonesia dan para

mediator perdamaian sendiri yang abai terhadap resolusi itu. Aye Chan Naing, aktivis *Democratic Voice of Burma*, memberi kesaksian atas apa yang terjadi di negaranya dengan menyandarkan apa yang pernah diucapkan Aung San Suu Kyi bahwa tidak pernah ada satu perang pun yang dimulai oleh perempuan, tapi sungguh perempuan dan anak-anak adalah korban utama dan yang paling menderita atas situasi dan konflik itu. Meskipun perempuan sangat menderita dalam rejim militer di Burma, beribu-ribu perempuannya telah memainkan peran penting dalam politik Burma. San Suu Kyi adalah pemimpin *the National League for Democratic Party* yang memenangkan 80 persen kursi parlemen pada tahun 1990 dan juga penerima nobel perdamaian. Kendati San Suu Kyi dipenjara sejak 1989 sampai sekarang oleh rejim militer Burma karena penegakan HAM dan demokrasi, organisasi-organisasi perempuannya masih aktif dalam memperjuangkan demokrasi di Burma dan juga bekerja keras untuk kesetaraan jender dalam tingkat regional, nasional dan internasional. Sebaliknya, meski telah tujuh tahun resolusi 1325 diratifikasi di Burma; tapi tidak satu paragraf pun dari resolusi itu yang diimplementasikan. Misalnya dengan menyertakan perempuan dalam kebijakan di berbagai level serta ikut dalam mekanisme pencegahan, manajemen dan dalam resolusi konfliknya. Lebih dari itu, di sana juga tidak ada satu perempuan pun yang ikut dalam pengambilan kebi-

jakan di pemerintahan dan dalam sistem pengadilan tingginya.¹⁴

Pengalaman Perempuan dan Penyemai Perdamaian

Pengalaman-pengalaman damai dan konflik itulah barangkali yang mengilhami Bunda Theresia, Shirin Ebadi (Iran), Wangari Muta Maathai (Kenya), Suraiya Kamaruzzaman (Aceh), Hilda D. Rolobessy (Maluku) dll merelakan hidupnya keluar masuk penjara dan tak gentar berhadapan dengan rezim yang berkuasa untuk menegakkan keadilan, memberi kenyamanan, membebaskan dari rasa takut, dan menyemai perdamaian.

Dalam teori feminisme mengenai perdamaian yang dikenal dengan *framework scholarship* atau *New Social Order Perspective* dikatakan bahwa teknologi perang dan teknologi eksploitasi seksual sama-sama bersifat destruktif. Teori perdamaian itu lalu menjadi dasar kampanye perempuan mengenai reproduksi, perang nuklir, atau penyalahgunaan lingkungan alam secara agresif melalui obat-obatan dan pestisida.¹⁵ Bagi feminis, pelucutan senjata dalam suatu konflik bukan berarti selesainya konflik itu secara teknis dan politis, tetapi juga menyangkut soal sosial dan psikologis. Teori perdamaian dalam pandangan feminisme itu mengidentikan perdamaian dengan sifat

keibuan. Sifat-sifat ibu yang lembut, tenang, penuh cinta adalah syarat mutlak tumbuhnya perdamaian. Teori itu juga sudah diujikan untuk melihat bagaimana kekerasan terjadi pada antar individu, antar ras, dan internasional.

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan bersumber dari ideologi maskulin di mana kekerasan disamakan sebagai hal yang aktif dan berani. Perdamaian bagi ideologi feminisme mengganti kekerasan dengan pemberdayaan melalui peningkatan kesadaran.

Meskipun mereka terbukti menjadi korban dan punya potensi memberdayakan perdamaian, mereka jarang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan



¹⁴ Paper Aye Chan Naing, "The Role of Women in Peace Building," dipresentasikan pada Konferensi Women for Peace yang diselenggarakan oleh Dept. Filsafat UI, Jakarta 30 April -1 Mei 2007. Lihat juga "Voice For Reconciliation " oleh Naw Khine Mar Kyaw Zaw dalam *Burma Women's Voices Together*, (ALTSEAN: Burma Publishing, 2003), hlm. 173

¹⁵ Jurnal Perempuan, No.24 Th 2002, hlm.156

di negeri kita. Di banyak tempat, mereka punya sumbangan yang sangat signifikan dalam melahirkan perdamaian. Ini misalnya terlihat dalam Konggres I perempuan Aceh yang dihadiri 400-an orang pada tahun 2000 mengusung tema “*Kru seumangat, Uroeng Inong Aceh kea man dan dame*” (Perempuan pencetus ide menyelesaikan konflik di Aceh dengan dialog dan mengedepankan perdamaian). Di Ambon misalnya, Hilda D. Rolobessy adalah contoh penyemai kedamaian dengan menjadi negosiator dari pihak-pihak yang bertikai.

Bagaimana mereka melakukan negosiasi dan menciptakan perdamaian? Ada banyak perempuan di bawah ini yang berani mengorbankan dirinya demi perdamaian dengan atau tanpa embel-embel kemasyhuran dan segala atribut yang semu, baik sebagai *peacekeeping* maupun *peace building*.

Dalam pelanggaran HAM, perempuan korban bertestimoni di Jakarta. Suciwati, istri aktivis Munir, barangkali contoh yang paling sering disebut. Bahkan ia mencari keadilan sampai menembus batas geografik dan geopolitik. Selain bertestimoni, ia membangun kehidupan sosial ketika laki-laki pergi untuk alasan keamanan seperti mencari nafkah, mengurus anak, mencari dan menguburkan mayat, membersihkan rumah dan tempat ibadah.

Jika dalam teori feminisme perempuan sering dikenai dengan *double burden*

(beban ganda) barangkali mereka para penyemai perdamaian itu sebagai seseorang dengan *triple burden* (tiga beban). Yaitu sebagai ibu rumah tangga, pekerja, dan beraktivitas sosial. Banyak hal dilakukan mereka, jauh dari gemerlap sorot kamera dan publisitas yang penuh kemasyhuran. Tidak juga dalam meja-meja perundingan. Tapi cukup perdamaian itu dimulai dari dirinya dan sekitarnya. Perempuan memberi dukungan kepada korban lain, menemani, berbagi cerita atau dengan strategi bertahan sambil menyebarkan poster ajakan berdamai di wilayah-wilayah rawan konflik.

Di bawah ini adalah sebagian kecil dari pengalaman perempuan yang gigih menegakkan perdamaian di mana peran dan pengabdian mereka tak diragukan lagi karena telah banyak diakui mampu meredam kelompok-kelompok yang bertikai dengan caranya sendiri maupun bersama kelompoknya. Adalah Hilda D. Rolobessy dari Ambon,¹⁶ Ketua Lakpesdam NU Ambon dan juga penanggung jawab *Early Warning System Conflict* (EWSC). Jaringan EWSC ini mempunyai tugas menjaga dan mendeteksi gejala awal konflik. Tak heran karena kesabarannya menghadapi berbagai kelompok yang berkonflik, Hilda yang perempuan dan muslim itu banyak didengar suaranya oleh kelompok manapun, termasuk para raja Maluku. Konflik Maluku yang berkobar atas dasar isu agama itu membuat Hilda merasa terpanggil dan bertanggung jawab

¹⁶ Lihat laporan khusus Majalah Tempo, 24 Desember 2006

untuk ambil bagian dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Perdamaian yang diupayakan bukanlah berhenti sebatas berhentinya pertikaian dan rukunnya dua kelompok atau lebih, tetapi lebih dari itu adalah terwujudnya kesejahteraan, pendistribusian ekonomi yang adil, dan kesetaraan jender. Bersama teman-temannya, ia membangun rekonsiliasi dan rehabilitasi konflik, relokasi pengungsi dan menghidupkan pendidikan serta membangun lapangan pekerjaan. Tentu saja semua itu taruhannya adalah intimidasi aparat, teror, penculikan, bahkan nyawa.

Hilda benar-benar meraih apa yang diupayakan. Kini ia dipercaya menganyam kepercayaan 50 Raja dan Tetua adat seluruh Maluku. Ia juga bergabung dalam Baku Bae dan Forum Antar Iman. Bahkan, bersama suster Brigitta Renyaan dari Amerika, ia pernah dinominasikan sebagai penerima nobel perdamaian. Namun di atas itu semua, ia merasa beruntung karena sepenuhnya didukung suami dan orang tuanya. Mereka semua tahu bahwa yang ia lakukan itu demi perdamaian di Maluku.

Selain Hilda, ada juga perempuan yang ketangguhannya tak diragukan lagi di Iran, tapi mungkin baru kita dengar namanya ketika ia mendapat nobel perdamaian. Beliau adalah Shirin Ebadi (56), seorang ahli hukum, hakim, pengajar, penulis, dan aktivis pembela hak asasi manusia di Iran, dan peraih Nobel Perdamaian 2003. Ia merupakan wanita Muslim pertama peraih penghargaan Nobel. Ia tokoh Muslim ketiga setelah

Yasser Arafat (1994) dan Anwar Sadat (1978). Ia juga merupakan wanita kesebelas setelah Jody Williams (1997) dalam 103 tahun sejarah Nobel.

Shirin berjuang selama 25 tahun untuk menegakkan keadilan di Iran lewat pena maupun gerakan. Sebagai pejuang HAM, Shirin dikenal sebagai sosok yang mengedepankan solusi yang demokratis dan damai atas berbagai masalah serius dalam masyarakat. Ia gigih membela individu maupun kelompok yang menjadi korban kekuasaan politik dan sistem hukum tidak manusiawi yang dilegitimasi dengan atau atas nama agama. Karena kegigihan dan kampanyenya bersama tokoh-tokoh yang lain, hukum keluarga di Iran berhasil direformasi. Salah satunya adalah seorang suami tidak lagi secara otomatis dapat menceraikan istrinya tanpa membayar uang tunjangan perceraian.

Shirin merupakan representasi dari kalangan Islam reformis dan melontarkan pemikiran-pemikiran baru dalam hukum Islam yang selaras dengan hak asasi manusia seperti demokrasi, persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum, serta kebebasan mengeluarkan pendapat. Ia percaya bahwa tidak ada masyarakat yang layak dijuluki 'masyarakat yang beradab' kecuali hak-hak perempuan dan anak-anak dihormati. Menurutnya, kekuasaan politik tertinggi dalam suatu masyarakat harus dibangun dengan dasar pemilihan yang demokratis. Ia lebih memilih jalur dialog sebagai jalan mengubah perilaku dan menyelesaikan konflik.

Ia mengakui tak mudah menjadi wanita di Iran karena hukum yang

berlaku di sana. Meskipun begitu, ia bersyukur karena berbagai kesulitan yang dihadapinya baik sebagai perempuan maupun ahli hukum justru meneguhkan perjuangannya yang dengan lantang dan tegas menyuarakan tegaknya demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.¹⁷

Pemerintah Iran secara resmi menyampaikan selamat kepada Shirin Ebadi, ketika ia menerima nobel perdamaian 2003. Meski demikian, kelompok garis keras Iran mengancam keras pemberian Nobel itu. Mereka mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan dukungan terhadap gerakan sekuler dan menganggap Komite Nobel Norwegia telah menjadi alat politik dan mencampuri urusan dalam negeri Iran. Shirin sendiri menilai bahwa dirinya dipilih bukan karena alasan politik, melainkan karena dunia menyadari bahwa perdamaian hanya akan terwujud melalui penghargaan terhadap HAM. Sebelumnya, Shirin menjadi presiden pengadilan kota di Teheran tahun 1975. Pada revolusi Islam lima tahun kemudian, ketika kaum mullah mengambil alih dan memutuskan perempuan tidak bisa memimpin pengadilan, ia kehilangan posisi itu. Sejak Revolusi Iran tahun 1979, ia menjadi aktivis pejuang demokrasi, HAM, perempuan dan anak-anak. Kongskuensinya sebagai pengacara telah banyak diterimanya. Bahkan ia pernah di penjara selama

beberapa minggu karena membela keluarga korban pembunuhan politik. Tahun 2001 lalu, Shirin dipenjara lagi karena menghadiri konferensi pembaruan Iran di Berlin. Meskipun Shirin sibuk dengan berbagai aktivitas, ia masih membagi pengalaman dan perjuangannya dalam membela anak-anak, perempuan, dan mereka yang lemah. Semua itu bisa dibaca pada karya-karyanya, misalnya, *A Study of Legal Aspects of Children's Rights in Iran (Teheran, 1994)*, *History and Documentation of Human Rights in Iran (New York, 2000)*, dll.

Setelah Shirin Ebadi, di Kenya ada Wangari Muta Maathai (64), perempuan Afrika pertama penerima nobel tahun berikutnya, 2004. Wangari adalah perempuan yang berdiri di barisan depan untuk memperjuangkan lingkungan, pembangunan budaya, dan ekonomi di Kenya, Afrika. Dengan menerapkan pendekatan holistik dalam perjuangannya, Wangari sekaligus dapat merangkul demokrasi, hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan. "Ia berpikir lokal, tetapi bertindak global," tegas Komite Nobel di Norwegia. Pernyataan ini sungguh beralasan. Mengingat betapa sulitnya menjadi seorang Wangari di tengah rezim represif Pemerintah Kenya pimpinan Presiden Daniel Arap Moi yang memerintah selama 24 tahun, dan terguling tahun 2002.

Ia mengabdikan hidupnya untuk

¹⁷ lebih jauh tentang profil Shirin Ebadi, lihat situs Ensiklopedi Tokoh Indonesia 2003

menyelamatkan hutan di Kenya yang dari hari ke hari semakin gundul, dan batasnya terus menyusut. Bagi Wangari, penggundulan hutan merupakan masalah utama di negeri itu karena 30 juta rakyat Kenya harus terus berjuang melawan kekeringan dan kemiskinan.

Sejak tahun 1977, Wangari sudah berjuang dengan mendirikan lembaga lingkungan bernama *The Green Belt Movement*, dan memulainya dengan menanam sembilan batang pohon di rumahnya. Perlahan-lahan organisasi ini mampu menanam 30 juta pohon dan berhasil mempekerjakan serta mendidik puluhan ribu perempuan di Afrika.

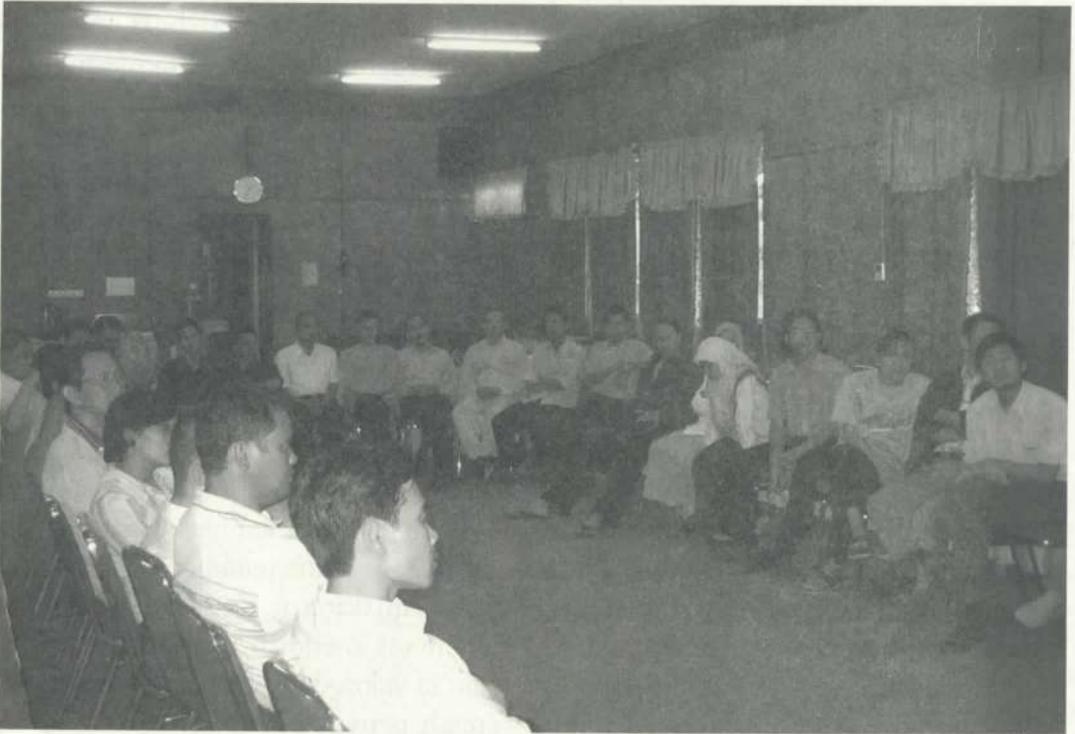
Salah satu klimaks pertentangan antara Wangari dan pemerintah adalah ketika Pemerintah Kenya tahun 2001 berupaya menghilangkan 170.000 acre (1 acre sama dengan 4046,86 m) hutan lindung, juga ketika pemerintah terus menggunduli wilayah Gunung Kenya (sekitar 300 KM dari Nairobi), dan berupaya membangun gedung pencakar langit 62 di Taman Nasional Uhuru. Di masa-masa inilah ia ditahan dan dipenjara berkali-kali oleh penguasa. Hampir setiap kampanyenya tentang penyelamatan lingkungan selalu dibayang-bayangi dengan ancaman fisik maupun psikis. Dalam penahanan di periode itu, polisi kadang memukulinya, dan bahkan pernah ia ditinggalkan dalam keadaan tak sadarkan diri. Menurut Wangari, sumber

alam dan lingkungan merupakan aspek yang paling penting dalam perdamaian, karena begitu sumber alam menjadi langka, bangsa-bangsa akan saling berperang. "Banyak perang di dunia ini yang sebetulnya memperebutkan sumber daya alam. Kami telah menanam benih-benih perdamaian," ujarnya. Kelompok *Green Peace* menyambut baik penghargaan tersebut, namun menilai Komite Nobel terlambat mengaitkan lingkungan dengan perdamaian dunia. Komite Nobel memang baru berniat untuk memperluas cakupan penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2001 dengan memasukkan tokoh-tokoh yang dianggap berjasa secara luar biasa dalam bidang lingkungan.

"Ini untuk pertama kalinya lingkungan menjadi penentu bagi penghargaan Nobel Perdamaian, dan kami telah menambahkan dimensi baru bagi perdamaian," kata Ketua Komite Ole Danbolt Mjoes. "Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi para perempuan yang sehari-sehari berjuang bagi keadilan sosial, kesetaraan jender, dan memulihkan martabat rakyat Afrika. Inilah abad Afrika, di mana perempuan dan pria Afrika telah menempatkan dirinya di tingkat global," ujarnya.¹⁸ "Saya hanya berupaya melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati," kata Wangari merendah.

Jika Wangari berjuang untuk lingkungan demi perdamaian, karena sumber daya alam diyakini menjadi penyebab

¹⁸ Lebih jauh tentang profil Wangari Muta Maathai, lihat situs Ensiklopedi Tokoh Indonesia 2004



Pertemuan tokoh agama dan adat di Jawa Barat dalam upaya peacebuilding.

Istimewa

peperangan, maka Barbara Lee menentang perang dari gedung kongres AS. Lee anggota kongres Amerika memperjuangkan anti perang dengan gigih. Ia menjuluki dirinya sebagai 'aktifis sejak lahir.' Pengalaman buruk ketika dilahirkan barangkali banyak mengilhaminya untuk menjadi pekerja sosial dan psikiater.

Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari perjalanan karirnya, lebih banyak hidupnya diwarnai empati dan usaha-usaha mengikis penderitaan dengan mengusahakan perdamaian. Dunia mencatat bahwa Lee adalah satu-satunya anggota kongres Amerika yang berdiri dan menolak untuk memberikan garansi bagi pemerintahan di bawah George Bush dalam mengerahkan kekuatan senjata

tanpa batas melawan terorisme pasca peristiwa 11/9 di New York dan Washington DC di antara 421 suara anggota kongres yang lain. Sebagai perempuan, Lee lebih mengedepankan nurani dan membuat strategi baru untuk mengupayakan cara-cara damai dari pada mengerahkan kekuatan senjata yang bisa mengorbankan orang-orang tak berdosa. Ia menegaskan bahwa beberapa orang dari kita harus berani mengatakan dan mengajak untuk berpikir sejenak akan implikasi dari segala yang diputuskan kongres sehingga nantinya semua menjadi tak terkendali. Orang-orang melihat itu sebagai ancaman sehingga ia harus mendapat perlindungan dari ancaman pembunuhan yang ditujukan kepadanya,

satu hal yang sulit dipercaya terjadi di negara yang katanya kampium demokrasi dan penegak HAM. Tapi dunia mendengar dan merespons positif keputusannya. Tindakan itu bukan yang pertama ia lakukan. Tahun 1999 sebagai anggota kongres, ia juga menentang otorisasi penuh bagi Clinton untuk menyerang Serbia dan dunia mencatat kata-katanya untuk itu "Yang kita butuhkan adalah strategi lain yang akan melahirkan perdamaian bukan kebinaan".

Meski banyak mendapat ancaman¹⁹ akan pilihannya itu, seminggu sebelum 'perang melawan terorisme' dimulai, Lee dan 37 koleganya dipanggil untuk merancang departemen perdamaian di tingkat kabinet setara dengan departemen pertahanan. Dengan segala yang dilakukannya, Lee berharap bahwa keadilan sosial menjadi tujuan sosial yang utama dan dengan prinsip yang kuat dan jelas bahwa perdamaian bukanlah situasi berakhirnya perang, namun masa dimulainya penegakan keadilan. Atas dedikasinya dan keberaniannya dalam menegakkan perdamaian dan keadilan, ia dinobatkan sebagai salah satu 'Women of the Year' oleh Ms. Magazine.²⁰

Perempuan-perempuan di atas masih

terus berjuang sampai hari ini. Tapi puluhan tahun lalu dan kita masih ingat sampai hari ini, jauh di sana, ada seorang perempuan yang hingga akhir hidupnya mengabdikan diri di tempat kumuh kaum miskin di Calcutta India. Dialah Bunda Theresia, perempuan kelahiran Irlandia yang awalnya seorang biarawati itu merasa harus terbang jauh meninggalkan Dublin, Irlandia karena panggilan jiwanya. Menurutnya, ia merasa lebih bermanfaat kalau ada di tengah orang-orang fakir itu, mendamaikan hidup mereka di tengah segala kekurangan, karena kedamaian juga adalah bagaimana membebaskan mereka dari kemiskinan. Kedamaian adalah bagaimana mendistribusikan kesejahteraan. Ia yakin dan rela berada di tengah-tengah penyakit dan kemiskinan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, karena itu yang terbaik bagi hidupnya. Kebaikan Bunda Theresia itu pun dapat dirasakan dan didengar banyak orang. Tidak mengejutkan kalau akhirnya Bunda Theresia pun mendapat nobel perdamaian.

Penutup

Benarkah perdamaian adalah cita-cita bagi semua? Ataukah perdamaian hanya untuk negeri di awan sebagaimana

¹⁹ Bukankah ancaman, intimidasi atau apapun bentuknya yang membuat ketidaknyamanan seseorang adalah tindakan menteror? Barangkali ini juga yang memanggil nurani Lee untuk menolak keras memerangi teroris dengan cara menteror. Kalau begitu, antara negara adikuasa dan teroris adalah satu watak, satu karakter. Yang membedakan hanyalah soal waktu dan penggunaan alat atau cara.

²⁰ Dirangkum dari Ms. Magazine, vol. XII edisi Desember 2001-Januari 2002 "Women of the Year" dan dikutip oleh Jurnal Perempuan no 24, 2002, hlm.152

lirik yang didendangkan KLA Project? Mustikah damai harus ada konflik, kendati adakalanya untuk meraih damai itu tak dapat menghindari perang? Setidaknya, yang harus kita lihat kembali dan kita ingat kembali adalah perdamaian dilakukan dengan berbagai macam cara dengan belajar pada pengalaman masyarakat sipil, terutama perempuan, dalam menciptakan perdamaian dengan persoalan dan tantangan yang paling dekat dengan hidupnya.

Para agamawan barangkali boleh berkilah dan menghadirkan teks-teks suci, bahwa tak satupun ajarannya mendorong kekerasan. Teks-teks suci agama semuanya menganjurkan perdamaian dan semangat memaafkan. Tapi kenyataannya konflik terus terjadi, bahkan tidak jarang atas nama agama.

Untuk membangun perdamaian, perempuan memiliki caranya sendiri untuk melakukan perubahan dan memperbaiki keadaan. Menyemai perdamaian dalam pengalaman perempuan harus

dimulai dari konflik yang paling dekat dari dirinya; keluarga, lingkungan, dan persoalan yang paling dekat lainnya. Karena sesungguhnya perempuan adalah jantung dan lokomotif lingkungannya. Bukankah keputusan yang dimulai dari lingkungan, keluarga dan unit terkecil akan melahirkan regulasi di tingkat yang lebih luas? Lihatlah bagaimana Wangari Mathaai memperhatikan lingkungan karena kemiskinan yang didera sampai menjadi isu dunia. Bagaimana Hilda mendamaikan konflik, Shirin yang memperjuangkan anak-anak dan perempuan dan tentu saja masih ada jutaan perempuan penyemai perdamaian yang akan menjadi *uncut stories* (cerita-cerita yang tak terpotong). Dalam peta besar konflik dan perdamaian, perempuan masih ada dalam garis merah, garis kerentanan menjadi korban konflik. Untuk menuju keadilan dan kesejahteraan, perempuan yang tangguh harus bisa menjaga perdamaian dan menciptakannya termasuk mendamaikan hatinya. ❖